Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 27139-27148

Reformasi Moneter dan Kedaulatan Negara: Analisis *Political Economy* terhadap Standardisasi Dinar dan Dirham pada Masa Abd al-Malik ibn Marwan.

Nur Fadhilah Handayani[1], Muhammad Maulana[2], Febrina Rezky[3]

[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
[2]Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
[3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

nurfadhilahhandayani@gmail.com m.maulana@ar-raniry.ac.id febrinarezky999@gmail.com

Published: Mei , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas reformasi moneter pada masa pemerintahan Abd al-Malik ibn Marwan sebagai strategi negara dalam membangun kedaulatan ekonomi dan legitimasi politik melalui standardisasi dinar dan dirham dalam perspektif political economy. Sebelum reformasi dilakukan, sistem moneter di wilayah Islam masih dipengaruhi mata uang Bizantium dan Persia Sassaniyah sehingga belum memiliki standar yang seragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi moneter dilakukan melalui pencetakan mata uang Islam secara mandiri, penggunaan tulisan Arab beraksara Kufi, standardisasi berat dinar dan dirham, serta pengawasan negara terhadap pencetakan dan distribusi mata uang. Reformasi tersebut memperkuat integrasi ekonomi, stabilitas moneter, dan legitimasi politik Dinasti Umayyah, sekaligus menjadi instrumen penting dalam membangun kedaulatan negara Islam.

Kata Kunci: reformasi moneter, dinar dan dirham, political economy, Dinasti Umayyah, Abd al-Malik ibn Marwan.

ABSTRACT

This study examines monetary reform during the reign of Abd al-Malik ibn Marwan as a state strategy to establish economic sovereignty and political legitimacy through the standardization of dinar and dirham within the perspective of political economy. Prior to the reform, the monetary system in Islamic territories was still influenced by Byzantine and Sasanian currencies and lacked uniform standards. This research employs a qualitative approach using library research methods and descriptive-analytical analysis. The findings show that the reform was implemented through the independent minting of Islamic currency, the use of Arabic Kufic inscriptions, the standardization of coin weights, and state supervision over currency production and distribution. The reform strengthened economic integration, monetary stability, and the political legitimacy of the Umayyad Dynasty, while also becoming an important instrument in establishing the sovereignty of the Islamic state.

Keywords: monetary reform, dinar and dirham, political economy, Umayyad Dynasty, Abd al-Malik ibn Marwan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem moneter dalam sejarah peradaban Islam merupakan bagian penting dalam proses pembentukan stabilitas ekonomi dan politik negara. Pada masa awal ekspansi wilayah Islam setelah periode Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, masyarakat di berbagai wilayah kekuasaan Islam masih menggunakan mata uang yang berasal dari imperium sebelumnya, seperti dinar Bizantium dan dirham Sassaniyah. Penggunaan mata uang tersebut menunjukkan bahwa sistem

moneter negara Islam pada tahap awal belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian ekonomi dan identitas politik negara Islam (Rahayu, 2024).

Ketergantungan terhadap mata uang asing tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan praktis dalam aktivitas perdagangan, tetapi juga berimplikasi pada pengelolaan administrasi keuangan negara. Perbedaan standar berat dan kualitas koin berpotensi menimbulkan kendala dalam sistem perpajakan, pembayaran gaji tentara, serta transaksi ekonomi antarwilayah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya reformasi moneter sebagai bagian dari upaya konsolidasi administrasi dan penguatan struktur negara Islam yang sedang berkembang (Fadhillah, 2022).

Reformasi moneter secara sistematis mulai dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Abd al-Malik ibn Marwan (685–705 M) melalui beberapa kebijakan strategis, antara lain pencetakan mata uang Islam secara mandiri, penghapusan simbol Bizantium dan Sassaniyah pada koin yang beredar, penggunaan bahasa Arab sebagai identitas administrasi negara pada mata uang, serta standardisasi berat dinar dan dirham di seluruh wilayah kekuasaan Dinasti Umayyah. Kebijakan tersebut tidak hanya merupakan perubahan teknis dalam sistem mata uang, tetapi juga menjadi strategi negara dalam membangun sistem moneter yang tersentralisasi, mengurangi ketergantungan terhadap pengaruh ekonomi Bizantium dan Sassaniyah, sekaligus memperkuat legitimasi politik serta kedaulatan ekonomi pemerintahan Islam (Abdullah, 2020).

Dalam perspektif *political economy*, reformasi moneter tidak hanya dipahami sebagai kebijakan teknis di bidang ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis negara dalam mengendalikan sistem ekonomi, memperkuat kapasitas fiskal, serta membangun legitimasi kekuasaan politik di wilayah kekuasaan Dinasti Umayyah. Standardisasi dinar dan dirham berperan dalam memperlancar perdagangan antarwilayah, mempermudah administrasi fiskal negara, serta memperkuat integrasi wilayah kekuasaan Dinasti Umayyah. Dengan demikian, reformasi moneter pada masa Abd al-Malik ibn Marwan tidak hanya bertujuan memperbaiki sistem mata uang, tetapi juga menjadi strategi negara dalam membangun sistem ekonomi yang mandiri dan berdaulat (Abdullah, 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perkembangan dinar dan dirham dalam sejarah ekonomi Islam serta kebijakan moneter dalam berbagai periode pemerintahan Islam. Penelitian Mega Rahayu menjelaskan perkembangan penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar dalam aktivitas perdagangan pada masa peradaban Islam (Rahayu, 2024). Sementara itu, Abdullah (2020) membahas sistem standar moneter Islam berbasis dinar dan dirham sebagai instrumen stabilitas ekonomi dalam sejarah Islam. Namun, kajian tersebut umumnya masih menempatkan pembahasan pada aspek historis perkembangan mata uang secara umum dan belum secara spesifik menganalisis reformasi moneter pada masa Abd al-Malik ibn Marwan dalam perspektif *political economy* sebagai instrumen penguatan kedaulatan ekonomi dan politik negara.

Berdasarkan keterbatasan kajian tersebut, diperlukan analisis yang lebih komprehensif mengenai reformasi moneter pada masa Abd al-Malik ibn Marwan dalam kaitannya dengan pembentukan kedaulatan ekonomi dan politik negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis reformasi moneter tidak hanya sebagai peristiwa historis dalam perkembangan sistem mata uang Islam, tetapi juga sebagai strategi *political economy* negara dalam membangun kedaulatan moneter, sentralisasi kekuasaan, dan legitimasi politik melalui kebijakan standardisasi dinar dan dirham pada masa Dinasti Umayyah. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan reformasi moneter sebagai instrumen strategis negara dalam memperkuat kontrol ekonomi dan integrasi administrasi pemerintahan Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kondisi sistem moneter di wilayah Islam sebelum dilaksanakannya reformasi moneter pada masa Abd al-Malik ibn Marwan, proses standardisasi dinar dan dirham beserta perubahan karakteristik dan mekanisme peredarannya, serta analisis reformasi moneter tersebut dalam perspektif *political economy* sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi dan politik negara Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji proses *replacement* mata uang lama menuju mata uang baru yang dilakukan secara bertahap dalam masyarakat serta faktor-faktor yang melatarbelakangi reformasi moneter, baik dari aspek kebutuhan ekonomi maupun kepentingan politik Dinasti Umayyah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengkaji reformasi moneter pada masa Abd al-Malik ibn Marwan melalui literatur ilmiah yang relevan. Data penelitian bersumber dari data sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang membahas sejarah dinar dan dirham, kebijakan moneter Dinasti Umayyah, serta pemikiran ekonomi Islam klasik dan kontemporer. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur yang berkaitan dengan kebijakan pencetakan serta standardisasi mata uang pada masa tersebut. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan secara sistematis latar belakang historis reformasi moneter serta menafsirkan kebijakan tersebut dalam perspektif *political economy*, yang memandang kebijakan moneter sebagai instrumen strategis negara dalam memperkuat legitimasi politik dan kedaulatan ekonomi. Untuk menjaga validitas kajian, penelitian ini juga menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur yang membahas topik serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sistem Moneter di Wilayah Islam Sebelum Reformasi Abd al-Malik ibn Marwan

Sebelum dilakukannya reformasi moneter pada masa pemerintahan Abd al-Malik ibn Marwan, sistem moneter yang digunakan di wilayah Islam masih belum memiliki standar yang seragam dan sangat dipengaruhi oleh sistem mata uang dari kekaisaran sebelumnya, khususnya Bizantium di wilayah barat dan Persia Sassanid di wilayah timur. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam telah menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai alat tukar dalam aktivitas ekonomi, namun koin-koin tersebut pada awalnya merupakan hasil impor dari Bizantium dan Persia yang kemudian digunakan oleh masyarakat Muslim dengan tetap menyesuaikan praktik penggunaannya sesuai prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dalam pertukaran dan larangan riba (Farooq, 2021 dalam Rahayu, 2024). Selain itu, standar berat dinar dan dirham pada masa tersebut juga belum seragam karena setiap wilayah seperti Damaskus, Kairo, Makkah, dan Irak masih menggunakan satuan ukuran yang berbeda, antara lain Qirat, Habbah, Kharrubah, dan Qamhah (Abdullah, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem moneter Islam pada masa awal masih bersifat adaptif terhadap sistem yang telah ada sebelumnya dan belum sepenuhnya berada di bawah kontrol administratif negara Islam secara terpusat.

Meskipun demikian, dinar dan dirham tetap memiliki peranan yang memiliki peranan strategis dalam sistem ekonomi masyarakat Muslim sebagai alat tukar sekaligus sebagai penyimpan nilai. Kandungan emas pada dinar dan perak pada dirham memberikan nilai intrinsik yang relatif stabil sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi serta menjaga kestabilan nilai kekayaan yang dimiliki. Stabilitas nilai tersebut juga mendukung kelancaran aktivitas perdagangan antarwilayah bahkan hingga perdagangan internasional, karena dinar dan dirham telah dikenal luas dan diterima di berbagai kawasan, baik di wilayah Islam maupun di luar wilayah Islam (Rahayu, 2024). Akan tetapi, dalam praktiknya penggunaan mata uang di wilayah Islam masih terbagi ke dalam dua zona mata uang utama, yaitu zona Bizantium di bagian barat dan zona Persia Sassanid di bagian timur, sehingga sistem moneter yang berlaku saat itu belum mencerminkan adanya kesatuan sistem ekonomi Islam yang terintegrasi secara menyeluruh (Heidemann, 1998).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakannya reformasi moneter oleh Abd al-Malik ibn Marwan, sistem moneter di wilayah Islam masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural, seperti belum adanya standardisasi berat dan bentuk mata uang, masih digunakannya mata uang asing secara luas dalam aktivitas ekonomi masyarakat, serta belum adanya sentralisasi kewenangan negara dalam proses pencetakan dan pengawasan mata uang. Selain itu, ketergantungan terhadap mata uang Bizantium dan Persia juga berpotensi melemahkan posisi politik dan ekonomi negara Islam karena sistem moneter belum sepenuhnya berada di bawah kontrol otoritas pemerintahan Islam. Kondisi tersebut menjadi latar belakang penting yang mendorong lahirnya kebijakan reformasi moneter pada masa Abd al-Malik ibn Marwan melalui pencetakan mata uang Islam secara mandiri, standardisasi berat dinar dan dirham, serta penggunaan bahasa Arab pada mata

uang sebagai simbol kedaulatan ekonomi dan legitimasi independensi ekonomi-politik standardisasi dinar dan dirham.

Proses Standardisasi Dinar dan Dirham pada Masa Pemerintahan Abd al-Malik ibn Marwan

Proses penyeragaman sistem moneter dinar dan dirham pada masa pemerintahan Abd al-Malik ibn Marwan dilakukan melalui beberapa langkah reformasi strategis yang terencana. Langkah pertama adalah kebijakan pencetakan mata uang Islam secara mandiri sebagai bentuk kedaulatan politik dan ekonomi negara Islam serta upaya mengurangi ketergantungan terhadap mata uang Bizantium dan Persia yang sebelumnya masih beredar luas di wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 74 H, Abd al-Malik mulai mencetak mata uang sendiri yang memuat kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* dan mendistribusikannya ke berbagai wilayah Islam, sekaligus membatasi penggunaan mata uang asing sebagai alat tukar resmi (Patih, 2023). Langkah kedua dilakukan melalui pembangunan tempat percetakan mata uang yang berada di bawah kendali pemerintah sehingga proses penerbitan dinar dan dirham dapat dilakukan secara terorganisir dan terpusat. Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya sistematis negara dalam memperkuat kontrol administratif terhadap sistem moneter (Zuhroh, 2023).

Selain membangun kontrol administratif, reformasi tersebut juga menunjukkan pola integrasi sistem moneter lama ke dalam sistem moneter Islam yang baru. Kebijakan penyeragaman sistem moneter yang dilakukan oleh Abd al-Malik ibn Marwan pada dasarnya tidak sepenuhnya menghapus sistem lama secara total, melainkan mengintegrasikan sistem sebelumnya ke dalam identitas moneter Islam yang baru, melainkan lebih tepat dipahami sebagai proses integrasi dan transformasi sistem moneter yang telah ada sebelumnya ke dalam identitas moneter Islam yang baru (Heidemann, 1998). Pada tahap awal reformasi, negara masih memanfaatkan struktur dan pola distribusi mata uang Bizantium dan Persia yang telah lama digunakan masyarakat, terutama dalam aktivitas perdagangan antarwilayah (Abdullah, 2020). Namun, secara bertahap unsur-unsur asing pada mata uang tersebut diganti dengan simbol, tulisan, dan standar Islam sehingga tercipta sistem moneter yang lebih terpusat dan seragam (Patih, 2023). Dengan demikian, reformasi moneter tidak dilakukan melalui pemutusan sistem lama secara mendadak, tetapi melalui proses integrasi administratif yang memungkinkan masyarakat beradaptasi terhadap standar mata uang baru tanpa mengganggu stabilitas ekonomi dan perdagangan (Sodik et al., 2025).

Langkah reformasi moneter berikutnya dilakukan secara menyeluruh pada tahun 77 H/697 M ketika Abd al-Malik ibn Marwan secara resmi menerbitkan dinar emas dan dirham perak bercorak Islam dengan desain yang berbeda dari mata uang sebelumnya. Reformasi ini ditandai dengan perubahan karakteristik fisik mata uang, yaitu penghapusan gambar-gambar figuratif yang sebelumnya dipengaruhi tradisi Bizantium dan Persia. Sebagai gantinya, digunakan tulisan Arab beraksara Kufi yang memuat kalimat tauhid dan ayat-ayat Al-Qur'an. Penggunaan kaligrafi Arab pada mata uang tersebut tidak hanya berfungsi sebagai identitas religius, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan politik dan budaya Islam. Sejak saat itu, dinar dan dirham Islam memiliki bentuk, standar, dan ciri khas tersendiri yang membedakannya dari mata uang asing yang sebelumnya digunakan masyarakat (Bakti & Sapa, 2025).

Dalam proses reformasi moneter, Abd al-Malik ibn Marwan juga melakukan Islamisasi terhadap desain mata uang yang sebelumnya masih dipengaruhi tradisi Romawi dan Sassaniyah. Reformasi tersebut bermula ketika Bizantium menambahkan simbol-simbol keagamaan Kristen pada mata uang mereka sehingga mendorong pemerintah Islam untuk mulai mencetak mata uang sendiri sebagai simbol independensi politik dan ekonomi. Pada tahap awal, dinar Islam masih menampilkan figur khalifah sebagai pemimpin umat dan panglima tertinggi. Akan tetapi, desain tersebut kemudian digantikan pada tahun 696–697 M dengan model epigrafis yang menggunakan tulisan Arab beraksara Kufi, ayat Al-Qur'an, dan kalimat tauhid tanpa menampilkan gambar figuratif. Perubahan serupa juga dilakukan terhadap dirham bergaya Sassaniyah dengan menghilangkan simbol dan gambar Kaisar Persia sehingga identitas mata uang Islam menjadi lebih independen secara ekonomi-politik dan berbeda dari pengaruh moneter Bizantium maupun Persia.

Reformasi moneter pada masa pemerintahan Abd al-Malik ibn Marwan tidak hanya mencakup perubahan administratif dalam sistem moneter, tetapi juga transformasi karakteristik fisik dinar dan dirham Islam. Perbandingan karakteristik mata uang sebelum dan sesudah reformasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Transisi Spesifikasi Mata Uang

Aspek	Masa Pra-Reformasi (Transisi)	Masa Pasca-Reformasi (77 H)
Desain	Meniru desain Bizantium dan Sassaniyah dengan sedikit modifikasi	Menggunakan desain epigrafis penuh dengan tulisan Arab beraksara Kufi tanpa gambar
Inskripsi	Campuran tulisan Yunani/Pahlavi dan Arab	Menggunakan tulisan Arab sepenuhnya (ayat Al-Qur'an dan kalimat tauhid)
Standar Berat	Beragam sesuai standar wilayah masing-masing	Dinar ± 4,25 gram; Dirham ± 2,97 gram (terstandardisasi)
Otoritas Penerbitan	Bersifat desentralisasi	Sentralisasi di bawah otoritas khalifah

Sumber: diolah dari Heidemann (1998), Abdullah (2020), dan Patih (2023).

Selain perubahan desain dan standar moneter, reformasi juga mencakup proses distribusi dan penggantian mata uang lama secara bertahap.

Gambar 1. Dinar Arab-Bizantium sebelum reformasi moneter pada masa Abd al-Malik ibn Marwan.



Sumber: Numista (diakses 13 Mei 2026).

Gambar 2. Dinar Islam pasca reformasi moneter tahun 77 H/697 M pada masa Abd al-Malik ibn Marwan.



Sumber: Wikimedia Commons (diakses 13 Mei 2026).

Gambar 3. Dirham bercorak Arab-Sassanian sebelum reformasi moneter pada masa pemerintahan Abd al-Malik ibn Marwan.



Sumber: Wikimedia Commons (diakses 13 Mei 2026).

Gambar 4. Dirham bercorak Islam pasca reformasi moneter tahun 77 H/697 M pada masa pemerintahan Abd al-Malik ibn Marwan.



Sumber: Wikimedia Commons (diakses 13 Mei 2026).

Perbandingan visual mata uang sebelum dan sesudah reformasi menunjukkan adanya transformasi simbolik dan administratif dalam sistem moneter Islam. Mata uang pra-reformasi masih memperlihatkan pengaruh Bizantium melalui penggunaan figur dan simbol visual tertentu, sedangkan mata uang pasca reformasi menampilkan identitas Islam yang lebih kuat melalui penggunaan kaligrafi Arab dan penghapusan unsur figuratif. Perubahan tersebut mencerminkan upaya negara dalam membangun sistem moneter yang lebih tersentralisasi dan independen secara ekonomi-politik. Langkah-langkah reformasi tersebut kemudian menimbulkan berbagai dampak penting dalam sistem ekonomi dan politik negara Islam. Selain perubahan pada aspek desain fisik, standardisasi dinar dan dirham juga dilakukan melalui pengaturan sistem pencetakan mata uang yang berada di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat. Negara melakukan pengawasan terhadap proses produksi agar memiliki standar berat dan kualitas logam yang seragam di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Kebijakan ini memperkuat integrasi ekonomi antarwilayah serta mempermudah aktivitas perdagangan karena masyarakat menggunakan mata uang yang sama dan memiliki meningkatkan kredibilitas moneter terhadap nilainya. Reformasi moneter yang dilakukan pada masa Abd al-Malik ibn Marwan bahkan sering disebut sebagai salah satu pencapaian manajerial terbesar dalam sejarah abad pertengahan karena keberhasilannya menciptakan sistem moneter yang stabil dan tersentralisasi di wilayah kekuasaan Islam (Heidemann, 1998). Dampak reformasi tersebut tidak hanya dirasakan dalam lingkup internal wilayah Islam, tetapi juga berpengaruh terhadap posisi mata uang Islam dalam jaringan perdagangan internasional. Stabilitas dinar Umayyah selanjutnya menjadikannya sebagai mata uang yang memiliki kredibilitas tinggi dan diterima secara luas hingga ke kawasan Eropa Barat. Bahkan raja seperti Offa of Mercia diketahui meniru dinar Islam dengan mencetak mata uang *mancus* karena tingginya tingkat kepercayaan terhadap standar dinar tersebut (Grierson & Blackburn, 1986; Naismith, 2011). Dengan demikian, penyeragaman sistem moneter dinar dan dirham pada masa Abd al-Malik ibn Marwan tidak hanya menghasilkan perubahan pada karakteristik fisik mata uang, tetapi juga memperkuat persatuan ekonomi, stabilitas sistem moneter, serta meningkatkan pengaruh mata uang Islam hingga ke tingkat internasional. Dalam proses peredarannya, reformasi moneter pada masa Abd al-Malik ibn Marwan juga tidak dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kekuasaan Islam, melainkan melalui tahapan yang berlangsung secara berangsur-angsur (Zuhroh, 2023). Hal ini disebabkan luasnya wilayah Dinasti Umayyah yang mencakup berbagai kawasan dengan tradisi ekonomi dan jenis mata uang yang berbeda (Heidemann, 1998). Pemerintah pusat terlebih dahulu mencetak dinar dan dirham standar di percetakan resmi negara, kemudian mendistribusikannya secara bertahap ke pusat-pusat perdagangan dan administrasi pemerintahan (Patih, 2023). Pada masa transisi, mata uang lama masih tetap beredar bersamaan dengan mata uang baru sampai masyarakat mulai terbiasa menggunakan standar moneter Islam yang telah ditetapkan pemerintah (Sodik et al., 2025). Kebijakan transisi bertahap tersebut menunjukkan bahwa reformasi moneter dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas perdagangan dan menghindari gejolak ekonomi di tengah masyarakat (Abdullah, 2020).

Proses replacement atau penggantian mata uang lama menuju mata uang baru dilakukan melalui mekanisme pengawasan otoritas fiskal pemerintah terhadap percetakan dan distribusi mata uang (Patih, 2023). Pemerintah tidak langsung menarik seluruh mata uang lama dari peredaran. Sebaliknya, pemerintah membatasi penggunaannya secara bertahap sambil meningkatkan distribusi dinar dan dirham bercorak Islam di berbagai wilayah (Heidemann, 1998). Literatur menunjukkan bahwa mata uang lama masih beredar pada masa transisi, namun otoritas negara mulai menetapkan mata uang baru sebagai standar resmi dalam pembayaran pajak, gaji tentara, dan administrasi pemerintahan (Abdullah, 2020). Dengan cara tersebut, masyarakat secara bertahap terdorong untuk menggunakan mata uang baru karena memiliki legitimasi resmi dari negara serta standar berat dan

kualitas yang lebih terjamin (Bakti & Sapa, 2025). Mekanisme replacement bertahap ini memperlihatkan adanya strategi negara dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem moneter baru tanpa menciptakan kekacauan ekonomi akibat penarikan mata uang secara mendadak (Sodik et al., 2025).

Reformasi moneter yang dilakukan oleh Abd al-Malik ibn Marwan menunjukkan bahwa kebijakan penyeragaman sistem moneter dinar dan dirham tidak hanya berorientasi pada perubahan teknis dalam sistem mata uang, tetapi juga menghasilkan dampak strategis terhadap penguatan kedaulatan politik dan integrasi ekonomi wilayah Islam pada masa Dinasti Umayyah. Melalui kebijakan pencetakan mata uang secara mandiri, perubahan karakteristik fisik koin menjadi bercorak Islam, serta pengawasan negara terhadap standar berat dan kualitas logam, sistem moneter Islam berkembang menjadi lebih stabil, terorganisir, dan berada di bawah kontrol otoritas negara. Dampak lain yang muncul adalah meningkatnya kredibilitas dinar Umayyah sebagai mata uang internasional yang diterima secara luas hingga ke kawasan Eropa Barat, sehingga memperkuat posisi ekonomi politik negara Islam dalam jaringan perdagangan global pada masa tersebut.

3.3 Reformasi Moneter dalam Perspektif Political Economy sebagai Upaya Memperkuat Kedaulatan Negara

Reformasi moneter yang dilakukan oleh Abd al-Malik ibn Marwan juga dapat dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan ekonomi sekaligus kebutuhan politik negara (Abdullah, 2020). Dari sisi ekonomi, penggunaan mata uang yang berbeda-beda di berbagai wilayah menyebabkan ketidakseragaman standar transaksi, kesulitan administrasi fiskal, serta hambatan dalam perdagangan antarwilayah (Heidemann, 1998). Sementara dari sisi politik, ketergantungan terhadap mata uang Bizantium dan Persia menunjukkan bahwa simbol ekonomi negara Islam masih berada di bawah pengaruh kekuatan asing (Fadilla, 2019). Oleh karena itu, reformasi moneter dilakukan bukan hanya untuk memperbaiki sistem ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk afirmasi kekuasaan dan kedaulatan Dinasti Umayyah (Patih, 2023). Dalam perspektif *political economy*, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penguasaan terhadap sistem moneter merupakan bagian penting dari proses konsolidasi negara dan penguatan legitimasi politik pemerintahan Islam (Nuha et al., 2025).

Reformasi moneter pada masa pemerintahan Abd al-Malik ibn Marwan dapat dianalisis dalam perspektif *political economy* sebagai strategi negara dalam membangun kedaulatan ekonomi. Melalui penguasaan instrumen moneter secara terpusat, pemerintah juga memperkuat legitimasi politik dan kontrol terhadap wilayah kekuasaan Islam. Kebijakan penerbitan dinar emas dan dirham perak bercorak Islami merupakan bagian dari proses Arabisasi administrasi negara yang menandai peralihan dari ketergantungan terhadap mata uang Bizantium dan Persia menuju sistem moneter yang mandiri (Patih, 2023). Dalam kerangka *political economy*, penguasaan atas mata uang tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai simbol otoritas politik negara dalam mengontrol aktivitas ekonomi masyarakat dan wilayah kekuasaannya.

Standarisasi mata uang tersebut berdampak pada penguatan kedaulatan negara melalui penggunaan unit moneter yang terpadu dalam sistem perpajakan dan administrasi negara. Selain itu, kebutuhan penukaran mata uang asing menjadi berkurang sehingga aktivitas ekonomi berlangsung lebih efisien. Reformasi ini juga mendorong berkembangnya instrumen keuangan seperti *ruq'a* dan *sakk* yang menunjukkan munculnya sistem administrasi keuangan yang lebih modern dan terorganisasi.

Keberhasilan reformasi moneter tersebut tidak terlepas dari stabilitas politik yang relatif kuat pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan (685–705 M). Stabilitas ini didukung oleh peran Al-Hajjaj dalam menjaga keamanan wilayah timur kekuasaan Dinasti umayyah sehingga pemerintah pusat memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan konsolidasi ekonomi dan administrasi negara. Kondisi politik yang stabil memungkinkan pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan, sistem irigasi, dan fasilitas publik yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan industri serta memperluas jaringan perdagangan hingga ke wilayah India dan Asia Tenggara (Indah et al., 2025). Dalam perspektif *political economy*, stabilitas politik merupakan prasyarat penting bagi negara untuk menjalankan reformasi ekonomi struktural karena kebijakan moneter hanya efektif apabila didukung oleh kapasitas institusional dan kontrol politik yang kuat.

Lebih lanjut, reformasi fiskal melalui standardisasi mata uang pada tahun 77 H/697 M menunjukkan adanya upaya negara dalam menciptakan sistem moneter yang stabil, terstandardisasi,

dan berada di bawah sentralisasi moneter pusat. Penerbitan dinar dan dirham bercorak Islami dengan aksara Kufi tidak hanya bertujuan mengurangi praktik pemalsuan dan manipulasi mata uang, tetapi juga memperkuat identitas politik dan ekonomi negara Islam sebagai entitas yang berdaulat (Fadilla, 2019). Pendirian percetakan mata uang negara (*dar al-darb*) serta penggantian simbol-simbol Bizantium dengan lafaz-lafaz Islam seperti *Allahu Ahad* dan *Allahu Baqa'* menegaskan bahwa kebijakan moneter pada masa tersebut berfungsi sebagai instrumen politik simbolik yang memperkuat legitimasi kekuasaan sekaligus menandai transformasi sistem ekonomi menuju kemandirian moneter (Bakti & Sapa, 2025).

Selain itu, reformasi moneter juga didukung oleh kebijakan administrasi lainnya seperti pemberlakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan dan pemberian sanksi *ta'zir* terhadap pihak yang mencetak mata uang di luar percetakan negara (Patih, 2023). Kebijakan ini menunjukkan adanya integrasi antara reformasi ekonomi dan reformasi birokrasi sebagai bagian dari strategi negara dalam memperkuat kontrol terhadap wilayah kekuasaan. Reformasi ekonomi komprehensif lainnya seperti pengembangan *Diwan al-Barid*, pembatasan urbanisasi untuk menjaga stabilitas demografis, serta kebijakan pertanian dan perdagangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi semakin memperlihatkan bahwa reformasi moneter pada masa Abd al-Malik ibn Marwan merupakan bagian dari agenda besar konsolidasi negara secara politik dan ekonomi (Nuha et al., 2025). Dengan demikian, dalam perspektif *political economy*, reformasi moneter tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan stabilisasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun kedaulatan negara melalui penguatan kapasitas fiskal, integrasi administrasi, serta legitimasi politik pemerintahan Islam secara menyeluruh.

` Melalui reformasi moneter tersebut, pemerintah Dinasti Umayyah berhasil melakukan recovery atau pemulihan sistem keuangan negara secara lebih terorganisasi (Indah et al., 2025). Standardisasi dinar dan dirham mempermudah pengelolaan pajak, pembayaran administrasi negara, serta pengawasan terhadap peredaran uang di berbagai wilayah kekuasaan Islam (Abdullah, 2020). Sistem moneter yang lebih stabil juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pedagang terhadap mata uang Islam sehingga memperkuat aktivitas perdagangan domestik maupun internasional (Bakti & Sapa, 2025). Dengan demikian, reformasi moneter pada masa Abd al-Malik ibn Marwan tidak hanya berhasil menciptakan identitas mata uang Islam yang mandiri, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemulihan dan penguatan struktur ekonomi-politik negara secara menyeluruh (Nuha et al., 2025).

KESIMPULAN

Reformasi moneter pada masa pemerintahan Abd al-Malik ibn Marwan merupakan langkah strategis negara dalam membangun sistem moneter Islam yang lebih terstandardisasi, terpusat, dan mandiri. Sebelum reformasi dilakukan, wilayah Islam masih menggunakan mata uang Bizantium dan Persia Sassaniyah dengan standar berat, desain, dan sistem peredaran yang berbeda-beda sehingga sistem moneter belum sepenuhnya berada di bawah kontrol pemerintahan Islam. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai kendala dalam administrasi fiskal, perdagangan antarwilayah, serta legitimasi ekonomi-politik negara.

Melalui reformasi moneter, pemerintah Dinasti Umayyah melakukan pencetakan dinar dan dirham bercorak Islam secara mandiri, menghapus simbol-simbol asing pada mata uang, menggunakan tulisan Arab sebagai identitas administrasi negara, serta melakukan standardisasi berat dan kualitas logam mata uang. Reformasi tersebut juga didukung oleh pengawasan negara terhadap percetakan dan distribusi mata uang sehingga sistem moneter menjadi lebih stabil, terintegrasi, dan berada di bawah sentralisasi otoritas negara. Proses penggantian mata uang lama menuju mata uang baru dilakukan secara bertahap guna menjaga stabilitas perdagangan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter baru.

Dalam perspektif *political economy*, reformasi moneter pada masa Abd al-Malik ibn Marwan tidak hanya merupakan kebijakan ekonomi, tetapi juga instrumen politik negara dalam memperkuat kedaulatan ekonomi, sentralisasi kekuasaan, dan legitimasi pemerintahan Dinasti Umayyah. Standardisasi dinar dan dirham berhasil meningkatkan integrasi ekonomi wilayah Islam, memperkuat

kapasitas fiskal negara, serta meningkatkan kredibilitas mata uang Islam dalam perdagangan internasional. Dengan demikian, reformasi moneter pada masa Abd al-Malik ibn Marwan menjadi salah satu bentuk konsolidasi negara Islam yang penting dalam sejarah perkembangan ekonomi dan politik Islam.

REFERENCES

Abdullah, A. (2020). *The Islamic monetary standard: The dinar and dirham*. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 6*(1), 1–29. https://doi.org/10.25272/ijisef.1030977

Al-Arif, M. N. R. (2015). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Rajawali Press.

Fadhillah, N. (2022). Sejarah kebijakan moneter dalam Islam. *QIEMA: Qomaruddin Islamic Economics Magazine, 8*(1).

Fadilla. (2019). Sejarah penggunaan uang sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 4*(2), 97–106. https://doi.org/10.36908/isbank.v4i2.62

Grierson, P., & Blackburn, M. (1986). *Medieval European coinage: Volume 1. The early Middle Ages (5th–10th centuries)*. Cambridge University Press.

Heidemann, S. (1998). The merger of two currency zones in early Islam: The Byzantine and Sasanian impact on the circulation in former Byzantine Syria and northern Mesopotamia. *Iran, 36*, 95–112.

Huda, M. N. (2020). Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 1*(1), 94–105.

Indah, M., Gaffar, A. A., & Sirajuddin. (2025). Sistem ekonomi Bani Umayyah: Perkembangan dan pengaruhnya terhadap perekonomian Islam. *AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 5*(2), 345–361.

Naismith, R. (2011). *Money and power in Anglo-Saxon England: The southern English kingdoms, 757–865*. Cambridge University Press.

Nuha, F. J., Muharam, H. A., Zein, N. I. S., & Marlina, L. (2025). Kebijakan dan pemikiran ekonomi Islam pada masa Dinasti Umayyah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 3*(2), 57–66. https://doi.org/10.61132/santri.v3i2.1354

Numista. (n.d.). *Standing caliph dinar*. Retrieved May 13, 2026, from https://en.numista.com/catalogue/pieces70964.html

Patih, H. (2023). Kebijakan ekonomi pada masa Dinasti Bani Umayyah. *Journal of Industrial and Syariah Economics (JISE), 1*(1).

Prabowo Putra Bakti, A. A., & Sapa, N. B. (2025). Pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 4*(4), 1907–1914. Retrieved from https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS

Rahayu, M. (2024). Sejarah dinar dan dirham: Sebuah historical development. *Jurnal Bisnis, 2*(4).

Sodik, G., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2025). Sejarah kebijakan moneter di dunia Islam: Periode Umawiyah hingga Turki Utsmani. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, 6*(2), 111–140.

Wikimedia Commons contributors. (n.d.). *Arab-Sasanian coin (issue of Ubayd Allah ibn Abi Bakra) struck during the reign of 'Abd al-Malik ibn Marwan* [Photograph]. *Wikimedia Commons*. Retrieved May 13, 2026, from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arab-Sasanian_coin_(issue_of_Ubayd_Allah_ibn_Abi_Bakra)_struck_during_the_reign_of_%27Abd_al-Malik_ibn_Marwan.jpg

Wikimedia Commons contributors. (n.d.). *Dirham MET DP231242* [Photograph]. *Wikimedia Commons*. Retrieved May 13, 2026, from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dirham_MET_DP231242.jpg

Wikimedia Commons contributors. (n.d.). *Gold dinar of Abd al-Malik 697–98* [Photograph]. *Wikimedia Commons*. Retrieved May 13, 2026, from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gold_dinar_of_Abd_al-Malik_697-98.png

Zuhroh, I. (2023). Menapaki jejak-jejak kemajuan ekonomi Islam pada masa Dinasti Umayyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9*(1), 1329–1334. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7582